



Pemprov Kalbar Kembali Raih WTP

**Gubernur
Komit Segera
Tuntaskan
Rekomendasi**

PONTIANAK-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar)

kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, Selasa (9/5). Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2022, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) pada Pemprov Kal-

bar tersebut, diserahkan oleh Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kalbar.

Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Kalbar TA

2022 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Yakni telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung. Lalu material serta pelaksanaan program, dan kegiatan serta pelaporan keuangan telah didukung dengan SPI yang

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



TERIMA LHP: Gubernur Sutarmidji menerima LHP atas LKPD TA 2022, dan IHPD pada Pemprov Kalbar yang diserahkan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, Selasa (9/5).



Pemprov Kalbar Kembali Raih WTP

Sambungan dari halaman 1

efektif. "Sehingga BPK menyimpulkan bahwa opini atas LKPD Provinsi Kalbar TA 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi bahwa Kalbar mampu melaksanakan paripurna LHP pertama di wilayah VI BPK, atau termasuk yang tercepat di Indonesia. Namun, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemprov Kalbar, lanjut dia, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian. Diantaranya pelaksanaan atas 28 paket pekerjaan pada empat perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2,54 miliar. Lalu pengelolaan aset tetap, dan aset lainnya belum tertib.

Serta aset yang tidak ditemukan keberadaannya maupun tidak teridentifikasi, dan aset yang belum tercatat pada kartu inventaris barang. Juga pemanfaatan dan penggunaan aset tetap dan aset lainnya yang belum tertib, dan tidak sesuai ketentuan. "Hal itu menunjukkan bahwa, meskipun opininya sudah WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada Pemprov Kalbar," pesannya.

Selain itu, Pius berharap pada tahun 2023 ini, Pemprov Kalbar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Karena salah satu yang harus digarisbawahi, bahwa pencapaian opini WTP

akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat di Kalbar belum tercapai.

Kemudian, Pius juga mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalbar beserta jajaran, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan. "Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar akan berupaya secepat mungkin menuntaskan rekomendasi yang diberikan BPK. "Tadi ada catatan ada kegiatan yang Rp2,8 miliar itu, Rp2,3-nya karena kurang volume, dia harus dikembalikan. Nah sebagian besar sudah setor kembali, itu lebih mudah. Insyaallah sebelum sebulan itu sudah kelar," katanya.

Kemudian untuk catatan, atau rekomendasi yang lain disebutkan dia, Kalbar perlu menurunkan angka pengangguran terbuka. Untuk yang satu itu, menurutnya angkanya memang sudah terus turun. Termasuk pula angka kemiskinan, juga terus mengalami penurunan. "Kalau gini ratio kita, jauh lebih baik dari nasional. Nasional 0,382 atau 0,386 kalau tidak salah, kita (Kalbar) hanya 0,311 sampai 0,315, jadi sangat jauh (dari nasional). Nah kemudian yang lainnya saya rasa sudah sesuai dengan standar akuntansi, temuannya tidak material karena

kecil, jadi Insyaallah bisa kita selesaikan sebelum 60 hari," paparnya.

Sementara rekomendasi BPK soal aset, Midji-sapaan karibnya menjelaskan, dari 300 item aset, sebanyak 100 item diantaranya belum bersertifikat, dan yang lainnya belum dinilai. Untuk yang belum dinilai, kata dia dikarenakan ada persoalan yang belum disepakati dalam perhitungannya. "Belum sepakat apakah dilakukan oleh appraisal, atau DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), atau apa. Nah saya kemarin sudah sepakat untuk menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) saja, NJOP kan tinggal dimasukkan-masukkan saja, jadi cepat selesai," terangnya.

Selanjutnya yang juga menjadi persoalan dikatakan dia, ada beberapa aset Pemprov yang masih dikuasai oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah pensiun. Untuk yang demikian menurutnya juga akan terus ditertibkan. Caranya dengan memberikan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). "Jadi dengan memberikan HGB di atas HPL, tapi bayar retribusi," pungkasnya.

Seperti diketahui, turut hadir pula dalam sidang paripurna tersebut, antara lain, Ketua DPRD Kalbar M. Kebing, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Kalbar Wahyu Priyono, para pejabat struktural BPK RI Kalbar, serta tim pemeriksa LKPD Provinsi Kalbar, dan anggota DPRD Kalbar lainnya. (bar)